

ANALISIS STAKEHOLDER DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU PRAKERJA DIMASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PEKANBARU

¹⁾Awalia Agustiana, ²⁾Febri Yuliani

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau

Awalia.agustiana01@gmail.com

Febriyuliani.fisipunri@gmail.com

Abstrak

Program Kartu Prakerja adalah program pemerintah Indonesia dalam bentuk bantuan biaya pelatihan kepada masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kemampuan atau meningkatkan keterampilan praktis untuk dunia kerja. Program kartu prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, atau yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui stakeholder dalam implementasi program kartu prakerja pada masa pandemi COVID-19. Teori yang digunakan adalah teori Reed et al (2009) dalam Nurfatriani et al., 2015. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Informan diambil dengan teknik purposive dan snowball sampling yaitu penentuan sampel berdasarkan atas pertimbangan. Penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa stakeholder dalam implementasi program kartu prakerja pada masa pandemi COVID-19 di kota Pekanbaru sudah menjalankan perannya dengan baik dalam implementasi program kartu prakerja, namun kurangnya hubungan antar stakeholder dalam bentuk komunikasi dan koordinasi.

Kata kunci: Stakeholder, Program Kartu Prakerja, Covid-19

Abstract

The Pre-Employment Card Program is an Indonesian government program in the form of training fee assistance to the Indonesian people to improve their abilities or improve practical skills for the world of work. The pre-employment card program is a work competency development program aimed at job seekers, laborers who have been terminated, or who require competency improvement. The purpose of this study was to identify stakeholders in the implementation of the pre-employment card program during the COVID-19 pandemic. The theory used is the theory of Reed et al (2009) in Nurfatriani et al., 2015. This research method uses qualitative methods. Informants were taken using purposive and snowball sampling techniques, namely the determination of the sample based on considerations. This research uses interview, observation and documentation methods. The results of this study indicate that stakeholders in the implementation of the pre-employment card program during the COVID-19 pandemic in the city of Pekanbaru have played their role well in the implementation of the pre-employment card program, but the lack of relationships between stakeholders in the form of communication and coordination.

Keywords: Stakeholders, Pre-Employment Card Program, Covid-19

A. PENDAHULUAN

Sektor tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi, khususnya dalam upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Tenaga kerja adalah model yang mendorong pembangunan, sehingga kemakmuran suatu negara atau wilayah sangat bergantung pada penggunaan tenaga kerja secara aktif sebanyak mungkin. Upaya menciptakan kuantitas dan kualitas kerja yang cukup diharapkan mampu menyerap tenaga kerja ekstra yang masuk ke pasar kerja setiap tahun. Peningkatan jumlah tenaga kerja yang tidak diimbangi dengan peningkatan kesempatan kerja akan mengakibatkan penurunan tingkat penyerapan tenaga kerja atau tingkat penyerapan tenaga kerja.

Mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan Presiden Joko Widodo menerbitkan Program Kartu Prakerja yang merupakan stimulus sejak kampanye 2019 dan diimplementasikan pada tahun 2020 diharapkan dengan adanya program tersebut dapat membantu meningkatkan kemampuan untuk dunia kerja. Program Kartu Prakerja adalah program pemerintah Indonesia dalam bentuk bantuan biaya pelatihan kepada masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kemampuan atau meningkatkan keterampilan praktis untuk dunia kerja. Program kartu prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, atau yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

Penghujung tahun 2019 ini, dunia dihebohkan dengan konflik di Wuhan, China, yakni COVID-19 (*Coronavirus Disease-2019*). Pandemi COVID-19 tidak hanya menyerang manusia, tetapi juga menyerang perekonomian Indonesia, sehingga memperburuk kondisi perekonomian Indonesia. Karena pandemi COVID-19 telah menyebabkan banyak pemutusan hubungan kerja (PHK) selama pandemi, tingkat pengangguran meningkat.

Pemerintah Pekanbaru berupaya memberikan peluang kepada masyarakat dalam implementasi Program Kartu Prakerja. Kartu Prakerja tidak hanya untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan, namun juga buruh, karyawan dan pegawai. Namun prioritas diberikan pada masyarakat yang terkena dampak COVID-19 seperti masyarakat yang mengalami Pemutusan

Hubungan Kerja (PHK). Salah satu perangkat daerah yang menjadi *stakeholder* kunci dalam Program Kartu Prakerja ialah Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Pekanbaru.

Implementasi kebijakan tentu dibutuhkan *Stakeholder* yang mengetahui dan memahami kondisi ketenagakerjaan. *Stakeholder* merupakan suatu langkah yang penting dalam penentuan upaya advokasi yang akan dilaksanakan. Keberhasilan dalam penentuan kebijakan publik dan dukungan terhadap penyelesaian satu masalah tertentu sangat tergantung pada *stakeholder* yang terkait dan berperan langsung dalam implementasi program kartu Prakerja di kota Pekanbaru. Komunikasi dan kerja sama yang baik antara *stakeholder* menjadi kunci keberhasilan dari implementasi program kartu Prakerja di kota Pekanbaru.

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Riau terkait program kartu Prakerja salah satunya adalah dengan menyampaikan informasi secara transparansi dan akuntabilitas. Fungsinya yaitu untuk meminimalisir terjadinya miskomunikasi antara penyelenggara program dengan masyarakat sebagai sasaran program. Dalam hal ini dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi Riau terlihat belum melaksanakan perannya, karena yang terjadi adalah sebagian masyarakat banyak belum mengetahui bagaimana sistem kartu Prakerja. Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui akan adanya program kartu Prakerja tersebut.

Kartu Prakerja dilakukan secara online yang mana masyarakat harus berusaha mendaftarkan diri masing-masing namun pada kenyataannya dinas tenaga kerja dan transmigrasi belum memberikan sebuah aturan sistematis bagaimana cara pendaftaran kartu Prakerja tersebut. Kuota yang diberikan pemerintah untuk mendapatkan kartu Prakerja menjadi peluang bagi masyarakat untuk masyarakat yang terdampak COVID-19 untuk mendapatkan skill baru (*skilling*), meningkatkan keterampilan di bidang yang telah ditekuni (*upskilling*), atau di bidang yang baru (*reskilling*).

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis *Stakeholder* Dalam Implementasi Program Kartu Prakerja Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Kota Pekanbaru.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, Penelitian kualitatif dimulai dengan ide yang dinyatakan dengan pertanyaan penelitian (*research questions*). Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi yang bersifat deskriptif. Tujuan fenomenologi untuk mengetahui dunia dari sudut pandang orang yang mengalami secara langsung dan berkaitan dengan sifat-sifat alami pengalaman manusia, dan makna yang diletakkan padanya. Obyek kajian dari fenomenologi adalah sebuah kesadaran dari pengalaman (*awareness of experience*), yaitu keadaan yang memberikan sudut pandang pengalaman dari orang pertama. Metode ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan terperinci berdasarkan kenyataan yang ditemukan dilapangan melalui hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian ditarik suatu kesimpulan agar memberikan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan untuk mendapatkan solusi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi stakeholder merupakan tahap dengan melakukan identifikasi awal melalui data dinas dan masyarakat. Identifikasi dilakukan untuk mengetahui *stakeholder* yang terlibat dalam program kartu prakerja. Identifikasi *stakeholder* dilakukan dengan pengamatan lapangan dan wawancara dengan menggunakan metode *porposive sampling* dan *snowball sampling*. *Stakeholder* dipilih karna yang bersangkutan memiliki pengalaman dan pengetahuan yang relevan dengan fokus penelitian, dan berdasarkan pada data dan informasi yang diperoleh dari *stakeholder* satu dengan yang lainnya. keberhasilan sebuah program sangat dipengaruhi oleh pemangku kebijakan (*stakeholder*) baik subjek maupun objek dalam kebijakan program kartu prakerja. *Stakeholder* merupakan siapa yang memberikan dampak ataupun yang terkena oleh dampak dari suatu program, kebijakan dan pembangunan. *Stakeholder* itu sendiri bisa sebagai individu, kelompok, komunitas atau suatu lembaga yang terdapat dalam setiap tingkat masyarakat. *Stakeholder* yang terlibat dalam implementasi program kartu prakerja pada masa pandemi COVID-19 dikota pekanbaru yaitu dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi riau, dinas tenaga kerja kota pekanbaru, Bank BNI kota pekanbaru

dan yang merupakan pengguna program kartu prakerja yaitu masyarakat yang terdampak COVID-19.

Klasifikasi adalah sebuah penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan. Klasifikasi stakeholder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui golongan *stakeholder* dalam implementasi program kartu pra kerja pada masa pandemi COVID-19 dikota pekanbaru. Tujuan dibentuknya Program kartu prakerja adalah untuk meningkatkan kompetensi, produktivitas dan daya saing angkatan kerja, tetapi dalam situasi pandemi COVID-19 ini yang mengakibatkan fokus program kartu prakerja tertuang dalam dua dimensi, yaitu pelaksanaannya dilakukan secara online agar dapat mencegah terjadinya penularan virus COVID-19. Klasifikasi *stakeholder* dibagi menjadi dua klasifikasi diantaranya Klasifikasi Peran dan klasifikasi Tanggung Jawab. *Stakeholder* unsur pemerintah daerah yaitu Dinas Tenaga Dan Transmigrasi Provinsi Riau dan Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. *Stakeholder* dari unsur pemerintah daerah berperan dalam penyampaian informasi mengenai program kartu prakerja yang telah dirilis oleh pemerintah pusat, melakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan program kartu prakerja dan menyediakan data lembaga pelatihan yang berkualitas dimasing-masing daerah. Stakeholder unsur Bank Milik pemerintah, yaitu Bank BNI pekanbaru memiliki peran sebagai pengelola aliran dana kartu prakerja atau penyediaan jasa *cash management*, mengelola pembayaran insentif dan uang survei peserta kartu prakerja, juga mengelola pembayaran insentif pelatihan. BNI juga menjadi pihak Bank yang akan memastikan kebutuhan seluruh *stakeholder* dalam penyaluran kartu prakerja. *Stakeholder* dari unsur masyarakat yaitu masyarakat yang mendaftar kartu prakerja pada masa pandemi COVID-19, kota pekanbaru merupakan daerah yang termasuk golongan zona merah yang artinya peningkatan COVID-19 yang tinggi.

Bentuk hubungan dengan *stakeholder* yang terjadi dimasing-masing organisasi pemerintah akan berbeda satu dengan yang lainnya, tergantung organisasi itu sendiri bagaimana mereka membangun hubungan dengan para *stakeholder*. Hubungan antar stakeholder dalam implementasi program kartu prakerja pada masa pandemi COVID-19

di kota pekanbaru dikelompokkan menjadi hubungan komunikasi, dan koordinasi. bentuk komunikasi dalam hubungan *stakeholder* adalah pemerintah daerah hanya memberikan sosialisasi kepada masyarakat sebagai bentuk komunikasi pada masa pandemi COVID-19, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Riau Dan Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru menyampaikan informasi melalui media sosial dan media cetak. Sosialisasi yang dilakukan belum dapat menjangkau masyarakat untuk dapat mendaftar program kartu prakerja, dan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui informasi tersebut. Hubungan antar *stakeholder* dalam bentuk koordinasi belum dilaksanakan secara maksimal seharusnya pemerintah daerah dan stakeholder lainnya melakukan koordinasi dalam bentuk sinkronisasi yang mana maksud dari sinkronisasi dalam koordinasi adalah suatu usaha untuk menyesuaikan, menyelesaikan kegiatan, tindakan dan unit sehingga diperoleh keserasian dalam pelaksanaan tugas atau kerja masing-masing *stakeholder*.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang analisis *stakeholder* dalam implementasi program kartu pra kerja pada masa pandemi covid-19 di kota pekanbaru, maka dapat disimpulkan:

1. Identifikasi *stakeholder* dalam implementasi program kartu prakerja pada masa pandemi covid-19 di kota pekanbaru melibatkan *stakeholder* yang diantaranya Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Riau, Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, Bank BNI Pusat Kota Pekanbaru dan masyarakat.
2. Klasifikasi *stakeholder* dalam implementasi program kartu prakerja pada masa pandemi covid-19 di kota pekanbaru, Klasifikasi *stakeholder* yang dimaksud dalam hal ini adalah untuk mengetahui golongan *stakeholder* dalam implementasi program kartu pra kerja pada masa pandemi covid-19 dikota pekanbaru, diatanya, Klasifikasi peran dan tanggung jawab.
3. Hubungan *stakeholder* dalam implementasi program kartu prakerja adanya peran dan tanggung jawab dalam implementasi program agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan, stakeholder menjalankan peran dan

tanggungjawab dalam melaksanakan sosialisasi program kartu prakerja agar memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan mengakses program kartu prakerja tersebut.

E. REFERENSI

- Akib, H. (2010). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. 1(1), 1–11.
- Bryson, J. (2016). What to Do When Stakeholders Matter What To Do When Stakeholders Matter: A Guide to Stakeholder Identification and Analysis Techniques. August. <https://doi.org/10.1080/14719030410001675722>.
- Hayat. (2018). Kebijakan Publik Evaluasi, Reformasi, Formulasi (Pertama). Intrans Publishing.
- Kadir Wakka, A. (2014). Analisis Stakeholder Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KDHDTK) Mengkedek, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan (Stakeholders Analysis of the Management Mengekendek Forest for Special Purpose (KHDTK Mengkendek), Tana Toraja Distr. 47–56.
- Muadi, S. (2016). Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. Jurnal Review Politik, 6 (2), 195–224.
- Muliani. (2019). Analisis Stakeholder dalam Implementasi.
- Nurfatriani, F., Darusman, D., Nurrochmat, D. R., Yustika, A. E., Penelitian, P., Iklim, P., Gunung, J., & No, B. (2015). ANALISIS PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM TRANSFORMASI KEBIJAKAN FISKAL HIJAU (Stakeholder Analysis in Green Fiscal Policy Transformation). 105–124.
- Oktavia, F. (2016). Upaya Komunikasi Interpersonal Kepala Desa Borneo Sejahtera Dengan Masyarakat Desa Long Lunuk. Ilmu Komunikasi, 4(1), 239–253. <https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp->

content/uploads/2016/03/Jurnal_Fenny
Oktavian (03-02-16-08-53-37).pdf

- Purnama, R., & Sulastri. (2014). Analisis Model Kekuatan Stakeholder Dalam Desain Dan Implementasi Kebijakan UPI. *Jurnal Ilmu Manajemen & Bisnis*, 5(2), 85–96.
<https://doi.org/10.17509/jimb>
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11, 1–12.
<https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Septiana, Y. (2019). Analisis Stakeholder Pada Pembangunan Ekonomi Wisata Situ Cipondo Dikota Tangerang.
- Sherly Dwi Fedora, R. F. H. (2019). Analisis Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Pada Unit Hubungan Masyarakat (Humas) Dan Kesekretariatan PT Semen Padang. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 2(1).
- Suparno. (2017). Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek: Implemenatsi Kebijakan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang. Dwiputra Pustaka Jaya.
- Tahir, A. (2014). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Alfabeta.
- Taufikurokhman. (2014). Kebijakan Publik Pendelegasian TanggungJawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial Dan ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers.